

PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Jerry Joas Sawai, Drs., M.Si.
Muchlis Yahya, Drs., M. Si.
Mulyanto, Drs., MS.
Nugroho SBM, Drs., MS.
Sri Subanti, Dra., M.Si.
Edy Sungkowo, S.Pd., M.Si.
Yopie Sukarwi, Drs., MM.



PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Jerry Joas Sawai, Drs., M.Si.

Muchlis Yahya, Drs., M.Si.

Mulyanto, Drs., ME

Nugroho SBM, Drs., MS.

Sri Subanti, Dra., M.Si.

Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.

Yofie Sukarwi, Drs., MM.



Pembangunan dalam Perspektif Sosiologi

PGJ: 0015 - 256 + vi --- 14 x 20

Cetakan Perdana:

Juli 2008

Desain Sampul: Much, Nug, Mul

Setting/Editing: Jerry, Much, Mul, Nug, Banti, Edy, Yopie

Layout: Adam Sr.

Pracetak: Izzul

ISBN : 978-602-8271-00-4

Diterbitkan:

Penerbit Gunungjati Semarang

bekerjasama dengan

Kelompok Studi Mahasiswa S-3 Ilmu Ekonomi

Angkatan 2007 Universitas Diponegoro Semarang

*Tidak diperkenankan memperbanyak isi buku
ini tanpa ijin terlebih dahulu*



KATA PENGANTAR

Pembangunan menghasilkan ide kemajuan, berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Pembangunan juga didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada pula yang menafsirkan sebagai kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.

Pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu: *domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi*. Integrasi antara ketiga himpunan bagian disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Buku yang sedang dinikmati pembaca ini adalah mengulas pernah-berakhir pembangunan dari perspektif sosiologis, yang lebih mengambil domain sosial.

Pembangunan haruslah menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Karena itu, komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa

mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung; merupakan hakekat dari paradigma pembangunan berpusatkan pada kemanusiaan manusia

Buku ini merupakan hasil karya 7 (tujuh) penulis yang kebetulan tengah menempuh studi S-3 Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Tulisan-tulisan ini sudah melewati berbagai diskusi panjang. Masing-masing telah mengambil tema dan pendekatan yang hampir semuanya menggunakan perspektif sosiologi sebagai landasan analisis kajian.

Tema "Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma yang Berpusat Pada Rakyat" ditulis oleh Jerry Joas Sawai. Tulisan Muchlis Yahya membahas perihal peran masyarakat sipil ditulis dengan tema "Determinasi Masyarakat Madani di Tengah Ekskalasi Konflik Masyarakat yang Semakin Meninggi.

"Pemberdayaan Perempuan dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga: Kasus Grameen Bank di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang" dibahas oleh Mulyanto. Kemudian tema "Tinjauan Tentang Teori Ketergantungan" dibahas oleh Nugroho SBM. Sri Subanti mene;laah tentang "Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan di Era Otonomi Daerah untuk Mencapai Millenium Development Goals Indonesia". Makalah "Dampak Pembanguna Jalan Tol Semarang-Solo" dibahas oleh Edi Sungkowo. Buku ini ditutup dengan tulisan Yofie Sukarwi dengan tema "Pembangunan yang Meninggalkan Dampak Kerusakan Lingkungan Berkelanjutan: Dimensi Sosiologi Pembangunan"

Semarang, Juni 2008

Tim Penulis

DAFTAR ISI

1. Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma yang Berpusat Pada Rakyat
Oleh Jerry Joas Sawai, Drs., M.Si. 1 - 40
2. Determinasi Masyarakat Madani di Tengah Eskalasi Konflik Masyarakat yang Semakin Meningkat
Oleh Muchlis Yahya, Drs., M.Si. 41 - 72
3. Pemberdayaan Perempuan dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga: Kasus Grameen Bank di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
Oleh Mulyanto, Drs., ME. 73 - 112
4. Tinjauan Tentang Teori Ketergantungan
Oleh Nugroho SBM, Drs., MS. 113 - 128
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan di Era Otonomi Daerah untuk Mencapai Millenium Development Goals Indonesia
Oleh Sri Subanti, Dra., M.Si. 129 - 174
6. Dampak Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo
Oleh Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd, M.Si. 175 - 190
7. Pembangunan yang Meninggalkan Dampak Kerusakan Lingkungan Berkelanjutan: Dimensi Sosiologi Pembangunan
Oleh Yofie Sukarwi, Drs., MM. 191 - 256

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM
MENGATASI KEMISKINAN KELUARGA:
Kasus Grameen Bank di Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang**

OLEH : MULYANTO, Drs., ME

**BAGIAN
TIGA**

Lahir di Klaten 23 Juni 1968. Menyelesaikan studi S1 Ekonomi Pembangunan FE Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (1992) dan studi S2 Universitas Indonesia (UI) Jakarta dengan program kekhususan Ekonomi Perencanaan (1998). Bidang minatnya: Ekonomi Pembangunan, Perencanaan Regional dan Keuangan Daerah. Dosen program S1 & Program S2 MM /MESP UNS Surakarta. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dilakukan melalui Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS dan melalui Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE-UNS. Sejak tahun 2006 hingga sekarang (tahun 2008) dikontrak oleh USAID dalam kegiatan/proyek Local Governance Support Program (LGSP). Sejak 2007 tengah mengikuti Program S-3 Ilmu Ekonomi UNDIP Semarang.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Penanganannya cenderung berubah-ubah dan setiap dinas merencanakan program dan proyek terpisah dari program dan proyek dinas yang lain. Setiap kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan dilihat sebagai kegiatan jangka pendek (proyek) yang tidak saling berkaitan. Sebagai misal ketika pemerintah mempromosikan kredit mikro tidak disertai dengan adanya deregulasi di bidang perbankan, kebijakan di bidang pertanian tetapi tidak memproteksi pasar produksi pertanian, dan juga memba-has desa tertinggal tanpa adanya reformasi di bidang agraria, dan sebagainya (Binny Buchory (2005) dalam Ade Cahyat dan Moira Moeliono, 2005: 1). Hasilnya dapat diduga bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih tetap besar. Apalagi pendekatan yang digunakan untuk mengatasinya, sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi, karena metode inilah yang paling mudah untuk diamati, diukur dan diperbandingkan (-khususnya antar desa dan kota-). Padahal kemiskinan juga sangat terkait dengan berbagai dimensi lain, seperti: sosial, budaya, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, jenis kelamin, dan sebagainya.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang pada tahun 1970 adalah 70 juta jiwa (60%) dan terus mengalami penurunan pada tahun 1996 menjadi 22,50 juta jiwa (11,30%) [-dengan pendekatan lama-] atau sebesar 34,01 juta jiwa (17,47%) [-dengan pendekatan baru-]. Sejak krisis ekonomi terjadi angka kemiskinan mengalami peningkatan kembali, yaitu menjadi 49,50 juta jiwa (24,23%) tahun 1998. Pada juni

2007, angka kemiskinan di Indonesia juga masih besar, yaitu sebesar 37,13 juta jiwa (17,75%). Gambaran perkembangan data penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1970 hingga Juni 2007, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1.
Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia, Tahun 1970-2007

Tahun	Jumlah (dalam juta jiwa)	Jumlah (dalam persen)
(1)	(2)	(3)
1970	70,00	60,00
1976	54,20	40,40
1980	43,20	28,60
1984	35,00	21,60
1987	30,00	17,40
1990	27,20	15,10
1993	25,90	13,70
1996	22,50	11,30
1996 *)	34,01	17,47
1998	49,50	24,23
1999	47,97	23,43
2000	38,74	19,14
2001	37,87	18,41
2002	38,39	18,20
2003	37,30	17,42
2004	36,10	16,66
2005	35,10	15,97
2006	39,05	17,75
2007 **)	37,13	17,75

Catatan: *) Terjadi perubahan metode perhitungan kemiskinan.

**) Hingga bulan Juni

Sumber: Diolah dari Chriswadani Suryawati (2005: 121), Lukman Hakim (2007: 26 [Tabel 3]) dan Ambar Teguh Sulistiyani (2004: 7,13,24).

Selama pemerintahan Orde Baru (ORBA) telah ada beberapa program yang dicanangkan untuk menanggulangi kemiskinan, yang antara lain dalam bentuk: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (TAKESRA) dan juga Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (KUKESRA). IDT memiliki sasaran penduduk miskin yang ada di desa-desa tertinggal, sedang TAKESRA dan KUKESRA memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di luar lokasi

desa-desa tertinggal. Sasarannya dibatasi pada keluarga yang masuk dalam kategori Keluarga Prasejahtera (KP) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKB)1).

Secara umum tidak ada manusia yang ingin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karenanya diperlukan suatu tindakan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, sehingga keadaan suatu keluarga dan juga masyarakat menjadi lebih baik. Dalam suatu keluarga dimana tingkat kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, yang tidak diiringi dengan kemampuan ekonomi kepala keluarga (suami/ bapak) dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya, menuntut ibu (istri) untuk mampu mengatur perekonomiannya dengan baik, bahkan terkadang mengharuskan ibu rumah tangga (istri) tersebut untuk bekerja. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi biasanya ditujukan untuk menunjang ekonomi rumah tangga dan mengembangkan kegiatan tambahan atas dasar keahlian/ketrampilan yang dimilikinya, sehingga mampu memberikan penghasilan / pendapatan tambahan bagi keluarga.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasar pada latar belakang permasalahan di atas, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Aspek-aspek dan dimensi apa saja yang terkait dengan permasalahan kemiskinan?
- b. Mengapa program pemberdayaan sekarang ini sering dikaitkan dengan upaya untuk mengatasi/mengurangi kemiskinan?
- c. Sejauhmana Program *Grameen Bank* mempunyai peran/kontribusi terhadap upaya mengatasi masalah kemiskinan?

Dengan terjawabnya permasalahan tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi program-program yang terkait dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan, khususnya bagi warga di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengkaji permasalahan kemiskinan, program pemberdayaan perempuan, dan juga implementasi program *Grameen Bank* pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan keluarga (-kasus di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang-). Kajian atas permasalahan kemiskinan ditujukan untuk mengungkapkan berbagai aspek yang terkait dengan kemiskinan, sedang kajian terhadap masalah pemberdayaan perempuan untuk melihat sisi lain mengenai peranan perempuan/wanita terkait dengan masalah-masalah pembangunan dan upaya-upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Sementara implementasi program *Grameen Bank* untuk melihat aplikasi nyata mengenai peran perempuan/wanita dalam peningkatan kegiatan ekonomi rumah tangga, yang secara tidak langsung diharapkan mampu meningkatkan penghasilan keluarga. Hasil akhir dari semua ini diharapkan akan mampu menjadi faktor pendukung yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Aspek dan Dimensi Kemiskinan

2.1. Beberapa Pengertian

Dalam arti *proper* [-terkait dengan kepemilikan-] kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Sementara dalam arti luas, kemiskinan

merupakan suatu fenomena *multi face, integrated concept* atau multidimensional, yang mencakup dimensi-dimensi: (i) Kemiskinan (*proper*); (ii) Ketidakberdayaan (*powerless*); (iii) Kerentanan dalam menghadapi situasi darurat (*state of emergency*); (iv) Ketergantungan (*dependence*), dan (v) Keterasingan (*isolation*), baik secara geografis maupun sosiologis (Chriswardani Suryawati, 2005: 122).

BKKBN mengartikan kemiskinan sebagai keluarga miskin pra-sejahtera yang tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya; tidak mampu makan 2 (dua) kali sehari; tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja dan bepergian; bagian terluas rumah berlantai tanah; dan tidak mampu membawa anggota keluarganya ke sarana kesehatan. Pengertian ini kemudian digunakan untuk mendefinisikan Keluarga Miskin, yaitu (Tim Crescent, 2003: 5): (i) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging ikan/telur, (ii) Seta-hun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 (satu) setel pakaian baru, dan (iii) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni. Sedang pengertian Keluarga Miskin Sekali, yaitu keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih yang meliputi (Tim Crescent, 2003: 5-6): (i) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali atau lebih, (ii) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, dan (iii) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah.

Kemiskinan juga terkait dengan masalah budaya, dimana menurut Oscar Lewis, budaya kemiskinan adalah gaya hidup yang khas, yang berkembang di sebagian besar lapisan masyarakat miskin dan cara hidupnya sangat berbeda dengan lapisan masyarakat lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa budaya kemiskinan adalah: (i) Masyarakat itu miskin,

karena budaya dalam diri masyarakat tersebut, (ii) Masyarakat tidak terangsang untuk menyelenggarakan pembangunan, jadi sifatnya fatalism, (iii) Tidak ada tantangan untuk maju, (iv) Tidak mampu melihat hari esok dengan baik, dan (v) Cepat putus asa dalam menghadapi masalah. Sementara menurut John Kenneth Galbraith, budaya kemiskinan adalah cara penyesuaian yang sangat realistis terhadap keputusasaan. Budaya miskin dan kemiskinan merupakan proses saling memperkuat, semakin lebar putarannya / lingkarannya, akan semakin lebar kemiskinannya. Di lain pihak, Bill Waren (1982) telah menjelaskan bahwa ketergantungan adalah pengkondisian struktur kemiskinan. Sedang kemiskinan adalah hasil dari atau sama dengan keterbelakangan. Pembangunan dan keterbelakangan merupakan bagian yang terpisah (Ari Pradhanawati, 2008 [Paparan dalam format Power Point]).

2.2. Jenis-jenis Kemiskinan

Nasikun (2001) dalam Chriswardani Suryawati (2005: 122) membagi kemiskian ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

- a. **Kemiskinan Absolut.** Suatu keluarga dikatakan berada dalam kemiskian absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. **Kemiskinan Relatif.** Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan, antar satu daerah/wilayah dengan daerah/wilayah lainnya.
- c. **Kemiskinan Kultural.** Jenis kemiskinan ini, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor

budaya, seperti: tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar, dan sebagainya.

- d. Kemiskinan Struktural. Situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Sedang Owin Jarnasi (2004) dalam Chriswardani Suryawati (2005: 122) menyatakan bahwa kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain (-absolut, relatif dan kultural-). Sementara M. Mas' oed (1997) dalam Chriswardani Suryawati (2005: 122) membedakan kemiskinan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kemiskinan Alamiah. Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan Buatan. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

2.3. Beberapa Ciri/Sifat Kemiskinan

Pada tahun 1976, tepatnya saat pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ekonomi Perencanaan FE-UI Jakarta pada 14 Pebruari 1976, Emil Salim pernah menjelaskan mengenai ciri-ciri penduduk miskin, yaitu (Emil Salim, 1976a: 12-3):

- a. Sebagian Terbesar Penduduk Miskin Tinggal di Perdesaan. Hal ini sangat terkait dengan mata pencahariannya, yang sebagian besar adalah buruh tani yang tidak memiliki tanah sendiri. Kalaupun ada yang memiliki tanah, luasnya tidak seberapa dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup yang layak.
- b. Penduduk Miskin pada Umumnya adalah Penganggur atau Setengah Penganggur. Kalau ada pekerjaan sifatnya tidak teratur, atau pekerjaan tersebut tidak memberi pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang wajar. Mereka ini ada, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- c. Penduduk Miskin Biasanya Berusaha Sendiri dengan Menyewa Peralatan dari Orang Lain. Sifat usaha ini kecil atau usaha rumah tangga dan sangat terbatas karena tidak adanya modal untuk mendukung usahanya. Banyak dijumpai di perkotaan, tetapi dapat juga dijumpai di perdesaan.
- d. Kebanyakan Penduduk Miskin tidak Berpendidikan atau Berpendidikan Rendah. Rendahnya pendidikan sering berdampak pada kurangnya kesempatan untuk memperoleh jumlah yang cukup akan bahan kebutuhan pokok, perumahan, fasilitas kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan dan komunikasi serta fasilitas kesejahteraan sosial lainnya.

Dari ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan

hidupnya sendiri. Emil Salim dalam Alfian, dkk (1980: 35) juga telah mengungkapkan bahwa hal-hal yang tidak dimiliki oleh Penduduk Miskin, adalah sebagai berikut: (i) Mutu tenaga kerja yang tinggi; (ii) Jumlah modal yang memadai; (iii) Luas tanah dan sumber alam yang cukup; (iv) ketrampilan dan keahlian yang cukup tinggi; (v) kondisi fisik jasmaniah dan rohaniah yang cukup baik; serta (vi) lingkungan hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan.

2.4. Penyebab Kemiskinan

Nasikun (2001) dalam Chriswardani Suryawati (2005: 123) telah menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. **Policy Induces Processes:** proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) di antaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. **Socio-Economic Dualism:** negara eks-koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai oleh petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. **Population Growth:** perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedang pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- d. **Resources Management and the Environment:** adanya unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.

- e. *Natural Cycles and Processes*: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya, tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The Marginalization of Woman*: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and Ethnic Factors*: bekerjanya factor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif para petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Exploitative Intermediation*: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).
- i. *Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe*: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *International Processes*: bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu (Nasikun (2001) dalam Chriswardani Suryawati, 2005: 123):

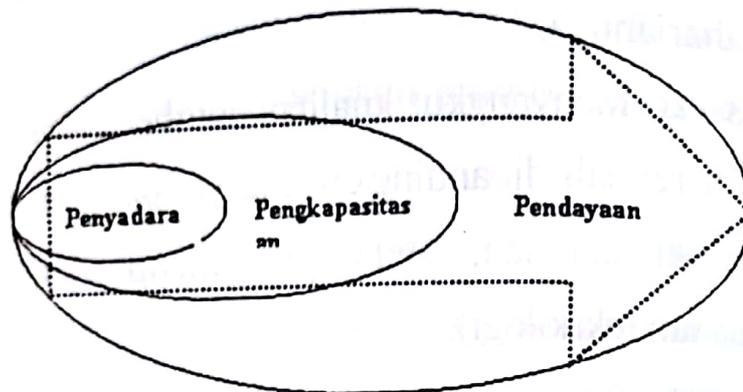
- a. *Natural Assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human Assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical Assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial Assets*: berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social Assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

3. Aspek dan Dimensi Pemberdayaan

3.1. Makna/Arti Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari dari penerjemahan bahasa Inggris '*empowerment*' yang bisa mempunyai makna 'pemberian kekuasaan' karena '*power*' bukan sekedar 'daya' tetapi juga 'kekuasaan', sehingga kata 'daya' tidak saja bermakna 'mampu' tetapi juga 'mempunyai kuasa' (Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D., 2007: 1). Dari pengertian tersebut, kemudian diturunkan ke dalam 3 (tiga) sisi pemberdayaan, yang terdiri dari (i) Penyadaran, (ii) Pengkapasitasan, dan (iii) Pendayaan. Secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1.
Tiga Tahapan dalam Proses Pemberdayaan



Sumber: Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, hal. 3.

Dari gambar 3.1 di atas jika diberikan penjelasan mengenai unsur-unsur pemberdayaan dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Penyadaran. Pada tahap ini, target sasaran diberi 'pencerahan' dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu'. Dalam kasus masyarakat miskin dan pola *Grameen Bank* misalnya, mereka (-para perempuan usia produktif dan ibu-ibu rumah tangga-) diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi lebih baik dan berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan dengan cara-cara yang bisa dijalankan. Dalam kasus *Grameen Bank* pola ini dapat diterapkan pada waktu penyelenggaraan kegiatan Latihan Wajib Kumpul (LWK), yang berisikan program-program pemberian pengetahuan yang bersifat kesadaran/ pengertian (*cognition*), kepercayaan/keyakinan (*belief*), dan penja-gaan/kepedulian (*healing*). Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (-membangun 'demand'-) diberda-yakan, dan proses

pemberdayaan sebaiknya dimulai dari diri mereka sendiri (-tidak dari orang luar-).

b. Pengkapasitasan. Istilah dalam bahasa Inggris yang sering digunakan adalah '*capacity building*' yang berarti upaya untuk memampukan atau '*enabling*'. Untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Dalam kasus Grameen Bank, sebelum pencairan pinjaman diberikan kepada masing-masing pihak, upaya untuk memampukan sasaran dan juga berbagai sarana-prasana pendukung harus sudah dimengerti dengan baik (Nama Centre, Nama Kelompok, Ketua, Sekretaris, Anggota, sarana pendukung lain (buku pinjaman, tabungan/simpanan), dan sebagainya). Ada 3 (tiga) jenis pengkapasitasan yang terkait dengan proses *capacity building*, yaitu (Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D., 2007: 4-6):

- 1) Pengkapasitasan Manusia. Upaya ini ditujukan untuk memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan (*training*), lokakarya (*workshop*), seminar, dan sejenisnya pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.
- 2) Pengkapasitasan Organisasi. Upaya ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Misalnya, sebelum diberikan peluang usaha, bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) atau dalam kasus Grameen Bank ada wadah yang bernama Central Office, Branch Office, Centre dan Kelompok; yang berfungsi untuk mewahadi kegiatan secara hierarkhi. Dalam

contoh riil, sering diilustrasikan sebagai upaya menyediakan lahan sebelum menanam padi atau jagung. Lahan inilah makna dari organisasi, sedang padi atau jagung adalah hal yang akan diberdayakan.

- 3) Pengkapasitasan Sistem Nilai. Setelah orang dan wadahnya dikapasitaskan, maka sistem nilainya juga harus difikirkan. Sistem nilai adalah 'aturan main', yang dalam cakupan organisasi diwadahi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD / ART), Sistem dan Prosedur, dan sejenisnya. Hasil akhir dari kegiatan ini, diharapkan akan menghasilkan 'sistem nilai tunggal' yang disepakati oleh anggota kelompok atau entitas organisasi.

- c. Pendayaan. Pendayaan atau pemberian daya mengandung maksud bahwa kepada target yang akan diberdayakan diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian daya ini sebaiknya disesuaikan dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki oleh penerima. Pemberian kredit kepada anggota kelompok *Grameen Bank* yang sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan (-melalui program Latihan Wajib Kumpul / LWK-) misalnya, masih perlu disesuaikan lagi dengan kemampuannya dalam mengelola pinjaman yang akan diberikan. Jika perputaran usahanya hanya mampu mencapai Rp 1,5 juta misalnya, tidak akan bijaksana jika diberikan pinjaman sebesar Rp 5 juta.

Dari pengertian di atas, maka pemberdayaan pada dasarnya adalah sebuah proses yang alamiah, yaitu proses yang sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dimana setiap tahapan usia akan berhadapan dengan permasalahan yang berbeda dengan cara penyelesaian yang tidak sama.

3.2. Strategi Pemberdayaan

Dalam upaya mengurangi kemiskinan, kata pemberdayaan sering digunakan sebagai alat/instrumen untuk mengatasinya. Strategi pemberdayaan bertujuan mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya terlibat dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini, masyarakat miskin bukanlah obyek dari suatu program/kegiatan tetapi sebagai subjek/pelaku dalam program/kegiatan tersebut. Keberdayaan penduduk miskin ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif, dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan/aset keluarga miskin. Keberdayaan juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri. Strategi pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan, mempunyai sasaran pokok sebagai berikut (Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D., 2007: 23-4):

- a. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar termasuk air minum dan sanitasi.
- b. Berkurangnya beban pengeluaran masyarakat miskin, terutama untuk pendidikan dan kesehatan, prasarana dasar, khususnya air minum dan sanitasi, pelayanan KB (Keluarga Berencana) dan kesejahteraan ibu, serta kecukupan pangan dan gizi.
- c. Meningkatnya kualitas keluarga miskin, ditandai dengan menurunnya beban keluarga miskin, yang dalam tahap berikutnya akan disertai dengan semakin meningkatnya penghasilan keluarga miskin.

- d. Meningkatnya pendapatan dan kesempatan berusaha kelompok masyarakat miskin, termasuk meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap permodalan, bantuan teknis, dan berbagai sarana dan prasarana produksi.

Peningkatan dalam pelaksanaan program di atas, pada akhirnya akan ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin secara kuantitas (-hasil perhitungan secara statistik-) namun juga diiringi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Pemberdayaan yang tepat sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan program di atas, yang secara umum ada 5 (lima) persyaratan, yaitu sebagai berikut (Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D., 2007: 25-6):

- a. Harus melibatkan masyarakat setempat secara kolektif dalam dalam suatu wadah organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut. Oleh karenanya, perlu dibentuk kelompok masyarakat yang berakar pada tingkat yang paling dasar (-terjadi kolektivitasnya-).
- b. Harus mempermudah akses warga masyarakat setempat pada sumber pendanaan untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karenanya, mekanisme transfer langsung ke rekening kolektif milik kelompok masyarakat merupakan pilihan yang sampai sejauh ini dianggap paling baik (-transfer langsung-).
- c. Harus ada kesadaran bahwa proses penanggulangan kemiskinan harus dilakukan sendiri oleh mereka secara demokratis demi memperkuat modal sosial dan membina nilai-nilai universal yang meliputi kejujuran, kemanusiaan, kebersamaan, gotong-royong, keadilan, dan sejenisnya. Oleh karenanya, pendampingan yang mengarahkan kepada hal-hal tersebut di atas sangat diperlukan.

- d. Harus melibatkan jajaran aparat negara mulai dari yang paling dekat dengan lingkungan warga masyarakat sampai pada tingkat kabupaten / kota dan provinsi.
- e. Pendekatan pemberdayaan harus dipahami sebagai strategi, dan bukan sebagai tujuan. Sementara tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, yang ditandai dengan semakin meningkatnya keluarga miskin dan selanjutnya ditandai dengan semakin berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar.

3.3. Pemberdayaan Perempuan

Kantor Meneg PP (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan) dalam Buku Saku Informasi Pemberdayaan Perempuan, pada bagian awalnya telah menerangkan mengenai konsep kesetaraan gender²), yang selengkapnyanya dapat diringkas sebagai berikut (Kantor Meneg PP, 2001: ii):

- a. Laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis, tetapi perlu bermitra, bekerjasama, dan saling melengkapi dalam hidup dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara,
- b. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mencapai cita-cita dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan tanpa ada diskriminasi terhadap perbedaan jenis kelamin (seks), dan
- c. Walaupun laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis, tetapi tidak boleh ada perlakuan yang berbeda, baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Berdasar atas konsep kesetaraan gender seperti tersebut di atas, kemudian dirumuskan Program Strategis Pemberdayaan Perempuan, yang meliputi (Kantor Meneg PP, 2001: 95):

- a. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan dengan program pembangunan lainnya,
- b. Peningkatan kualitas hidup perempuan, baik sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat maupun sebagai warga Negara,
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemampuan kelembagaan untuk pengarusutaman gender secara individu dan kelompok,
- d. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas,
- e. Peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan.

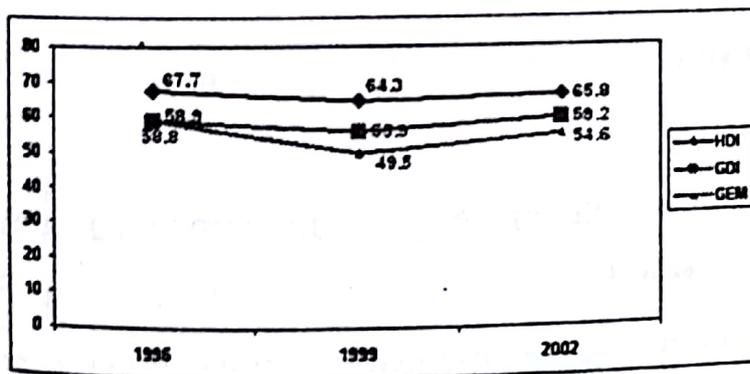
Keberhasilan pelaksanaan Program Strategis Pemberdayaan Perempuan tersebut di atas tidak akan berhasil jika tidak diiringi komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Dukungan komitmen yang dimaksud, antara lain (Kantor Meneg PP, 2001: 97):

- a. Penempatan posisi perempuan sebagai elemen penting dalam pembangunan nasional,
- b. Peningkatan kualitas (kondisi) perempuan dalam berbagai aspek,
- c. Peningkatan kedudukan dan peranan (posisi) perempuan dalam pengambilan keputusan,
- d. Pembentukan unit kerja (*focal point*) pemberdayaan perempuan di sektor dan daerah,
- e. Peningkatan dukungan anggaran dan fasilitas program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA),
- f. Penyempurnaan peraturan, sistem, dan perundang-undangan yang bias gender,
- g. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pembangunan sektor dan daerah, dan

- h. Perlindungan hukum dan penegakan HAM terhadap perempuan dan anak.

Apa yang diungkapkan di atas, adalah tinjauan dari sisi pemerintah yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan derajat dan kualitas kehidupan kaum perempuan. Namun jika dilihat dari realisasi program pemberdayaan perempuan, menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Data HDI (*Human Development Index*), GDI (*Gender-related Development Index*) dan GEM (*Gender Empowerment Measurement*), masih menunjukkan adanya kesenjangan yang tinggi. Berdasarkan data dari *Indonesia Human Development Report 2004* (data tahun 2002), angka/indeks HDI sebesar 65,8; angka/indeks GDI sebesar 59,2; serta angka/indeks GEM sebesar 54,6. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.3.1 berikut:

Gambar 3.3.1.
Perkembangan Besaran/Indeks HDI, GDI dan GEM di Indonesia, Tahun 1996-2002



Sumber: Lampiran Perpres No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009, hal.106, data diolah.

Ukuran GDI sama dengan ukuran HDI, hanya dengan memper-
timbang/memperhitungkan kesenjangan pencapaian antar laki-laki

dan perempuan. Selisih yang semakin besar antara HDI dan GDI menandakan semakin besarnya kesenjangan gender, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan dalam pembangunan gender atau masih terdapat kesenjangan gender.

Sementara untuk GEM yang menitikberatkan pada partisipasi, mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi (-perempuan dalam angkatan kerja dan rata-rata upah di sektor non-pertanian-), politik (-perempuan di parlemen-), dan pengambilan keputusan (-perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi dan manager-). Indeks GEM yang semakin tinggi menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan semakin besar/tinggi.

4. GRAMEEN BANK DAN UPAYA PENGURANGAN KEMISKINAN KELUARGA

4.1. Perintisan *Grameen Bank* Replikasi di Fakultas Ekonomi UNS Surakarta

Sekitar Mei 1995 setelah mengadakan serangkaian pembicaraan dengan beberapa dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang mengenai kemungkinan mengadopsi pola kerja *Grameen Bank* di Bangladesh, maka terbentuklah PT Bangun Karya Central Java (Replikator *Grameen Bank*) di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (FE-UNS) Surakarta. Dari berbagai dokumen yang ada, latar belakang didirikannya *Grameen Bank* di FE-UNS ini, antara lain (Bambang Sarosa, 2008: 2):

- a. sulitnya masyarakat desa, khususnya perempuan untuk memperoleh akses dana dan pinjaman, dimana kebanyakan dana (jika tersedia) hanya ditujukan kepada laki-laki,
- b. tidak adanya pertemuan yang sifatnya memberi informasi dan tukar pikiran yang dapat menambah wawasan pengetahuan perempuan di desa, dan
- c. adanya keinginan untuk berbuat sesuatu secara nyata yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa, khususnya kaum perempuan.

Secara umum tujuan didirikannya *Grameen Bank*, adalah untuk pemberdayaan perempuan agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan di negara asal *Grameen Bank* (Bangladesh), program pembangunan berkeadilan melalui *Grameen Bank* diupayakan bukan bersifat sebagai hadiah untuk kemiskinan, tetapi untuk menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Upaya pengembangan kapasitas masyarakat, dilakukan masyarakat sendiri tetapi melalui mekanisme kelompok. Oleh karenanya sasaran program harus ditujukan kepada lapisan paling miskin atau kaum perempuan yang paling rawan (*vulnerable*) terhadap dampak kemiskinan, khususnya perempuan desa yang memasuki usia kerja. Secara rinci program *Grameen Bank* Replikator yang dikembangkan di Fakultas Ekonomi UNS Surakarta, mempunyai tujuan sebagai berikut (Bambang Sarosa, 2008: 3):

- a. membantu perempuan desa yang menjadi anggota *Grameen Bank* untuk memperoleh dana dengan cara yang sederhana dan mudah,
- b. membentuk karakter anggota sebagai debitor yang bertanggung jawab, jujur, disiplin dan saling membantu melalui pertemuan yang diadakan setiap minggu, dan

- c. menyebarkan informasi yang diharapkan dapat memperkaya wacana dan pengetahuan dari anggota melalui pertemuan mingguan.

Pembentukan kelompok merupakan langkah awal yang paling strategis, dan akan menentukan keberhasilan program tersebut untuk selanjutnya. Dalam kelompok, para anggota secara bersama akan menentukan besarnya pinjaman, penggunaan pinjaman, dan juga pengawasan di dalam pengembalian angsurannya. Dengan demikian, selain menumbuhkan sifat gotong-royong juga membangun kemandirian, disiplin dan juga kejujuran dari para anggotanya. Secara detail teknis kegiatan operasional Grameen Bank dapat dijabarkan sebagai berikut (Bambang Sarosa, 2008: 3):

- a. membentuk kelompok dengan anggota 5 (lima) orang, dengan pembagian 1 orang sebagai ketua kelompok, 1 orang sebagai sekretaris, dan 3 orang sisanya sebagai anggota,
- b. setiap 8 (delapan) kelompok akan membentuk 1 centre dengan dipimpin 1 orang sebagai ketua centre,
- c. untuk menjadi anggota, setiap calon anggota wajib mengikuti Latihan Wajib Kumpul (LWK) yang diselenggarakan selama 3 hari secara berurutan, dengan lama latihan 1 jam untuk setiap harinya tanpa absen,
- d. setiap calon anggota wajib mulai menabung sejak mengikuti LWK, dimana besar tabungannya ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok,
- e. setelah selesai mengikuti LWK (-selama 3 hari tanpa absen-), setiap anggota boleh mengajukan pinjaman,
- f. uji kelayakan atas sejumlah pinjaman yang diajukan oleh pengelola dan *field staff* (petugas lapangan)

- g. pencairan dana dengan persetujuan anggota lain dalam satu kelompok, dengan skema 2+2+1 (-minggu pertama 2 orang, minggu kedua 2 orang, dan minggu ketiga 1 orang untuk ketuanya-),
- h. Setiap pencairan pinjaman dipotong sebesar 5% sebagai tabungan awal.

Prinsip kegiatan *Grameen Bank* secara umum adalah: (i) tidak ada pemberian bantuan/bantuan dalam bentuk apapun, (ii) tidak ada hidangan yang disuguhkan dalam bentuk apapun pada waktu pertemuan setiap minggu, dan (iii) disiplin waktu dari para anggotanya.

4.2. Program *Grameen Bank* di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang

Setelah mendapat pinjaman dari Program *Grameen Bank* Bangladesh pada bulan Juni 1999 dengan nilai sekitar Rp 119 juta, replikasi *Grameen Bank* di bawah pembinaan beberapa dosen dari Fakultas Ekonomi UNS dimulai. Kecamatan yang menjadi binaan pada awalnya mencakup: (i) Kecamatan Karangpandang dan Kecamatan Tawangmangu (Kabupaten Karanganyar); (ii) Kecamatan Simo dan Kecamatan Nogosari (Kabupaten Boyolali); dan terakhir di (iii) Kecamatan Susukan dan Kecamatan Pabelan (Kabupaten Semarang). Kajian ini hanya difokuskan pada kasus pelaksanaan Program *Grameen Bank* di Kecamatan Pabelan di bawah naungan PT Bangun Karya Central Java Cabang Salatiga.

a. Profil Kecamatan

Kecamatan Pabelan merupakan salah satu di antara 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Di lihat dari jumlah unit usaha yang ada, dari catatan yang ada tidak menunjukkan adanya Industri

Menengah dan Besar, sedang Jumlah Industri Kecil – Formal ada sejumlah 46 unit, dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 84 orang. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Bila dilihat dari jumlah desa yang ada pada tahun 2005 (-total ada 17 Desa-), terdapat 5 (lima) Desa dengan kategori Desa Tertinggal, yaitu: (1) Desa Karanggondang; (2) Desa Segiri; (3) Desa Bendungan; (4) Desa Tukang; dan (5) Desa Terban. Di antara ke-5 desa tersebut, ada 2 (dua) desa yang terlibat dalam kegiatan *Grameen Bank*, yaitu Desa Tukang (2 Centre) dan Desa Terban (1 Centre). Sedang desa lain yang terlibat dalam kegiatan *Grameen Bank* yaitu: (1) Desa Sukoharjo (3 Centre); (2) Desa Glawan (1 Centre); (3) Desa Padaan (1 Centre); (4) Desa Jembrak (2 Centre); (5) Desa Kadirejo (2 Centre). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.1. berikut.

Tabel 3.2.1.
Kondisi Demografi Desa-Desa di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, Tahun 2005

No.	Desa	Rukun Tetang. (RT)	Jumlah Kel.	Kepala Keluarga		Status Pekerja. Kpl Keluarga	
				L	P	Kerja	Tdk Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.	Ujung-Unjung	22	831	729	102	628	187
02.	Sumberejo	34	1.354	1.148	206	1.130	189
03.	Sukoharjo	20	773	654	119	741	23
04.	Karanggondang	15	480	421	59	447	16
05.	Segiri	15	602	508	94	533	50
06.	Bendungan	8	357	312	45	312	32
07.	Glawan	11	425	363	62	385	38
08.	Giling	13	398	353	45	291	99
09.	Padaan	12	675	553	122	487	181
10.	Pabelan	19	779	681	98	399	358
11.	Jembrak	21	626	538	88	520	91
12.	Kadirejo	23	850	716	134	630	205
13.	Kauman Lor	11	630	542	88	366	247
14.	Bejaten	10	269	236	33	163	105
15.	Semowo	31	1.128	970	158	986	115
16.	Tukang	18	672	561	111	613	48
17.	Terban	14	475	405	70	450	12
Total		297	11.324	9.690	1.634	9.081	1.996

Sumber: Kecamatan Pabelan (2006). Data Monografi Kecamatan Pabelan, data diolah

b. Kegiatan Utama Grameen Bank

Program *Grameen Bank* di Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, mulai dirintis pada bulan Oktober Tahun 2000. Kegiatan utamanya pada dasarnya adalah memberikan pinjaman bagi perempuan atau ibu-ibu di perdesaan, untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Jumlah pinjaman sebesar Rp 200.000,- untuk setiap anggota dengan jumlah anggota untuk pertama kalinya sebanyak 25 orang. Setelah berjalan kurang lebih 7 tahun (-hingga bulan April 2009-), dapat diungkapkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota yang dilayani sejak periode pertama pinjaman ada sebanyak 823 orang, namun demikian jumlah anggota yang aktif tinggal 427 orang, yang terbagi menjadi 299 orang berada di Kecamatan Pabelan dan sejumlah 128 orang di Kecamatan Susukan.
- 2) Jumlah Centre sebanyak 16 buah, dengan perincian sebanyak 123) Centre ada di Kecamatan Pabelan dan sebanyak 4 Centre ada di Kecamatan Susukan.
- 3) Jumlah Kelompok ada sebanyak 86 buah, dengan rincian sebanyak 61 Kelompok di Kecamatan Pabelan dan sebanyak 25 ada di Kecamatan Susukan.
- 4) Pos-pos penerimaan uang yang dirinci menurut sumbernya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penerimaan dari Head Office	:	Rp 41.150.000,-
b. Kumpulan Simpanan Kelompok	:	Rp 148.183.125,-
c. Kumpulan Angsuran Kelompok	:	Rp 1.104.742.000,-
d. Kumpulan Biaya Administrasi	:	Rp 276.185.500,-
- 5) Pos-pos pengeluaran uang yang dirinci menurut alokasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk pencairan pinjaman	:	Rp 1.276.850.000,-
b. Biaya-biaya Operasional	:	Rp 220.685.500,-
c. Penarikan oleh Head Office	:	Rp 24.225.000,-
d. Pinjaman pokok di Kelompok	:	Rp 92.226.565,-

6) Pos-pos lain-lain, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Uang beredar	:	Rp 172.106.000,-
b. Keuntungan dari Pemimjaman	:	Rp 55.500.000,-
c. Kumpulan Simpanan Anggota	:	Rp 55.956.560,-

Pola pinjaman pada *Grameen Bank* secara umum, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Setiap besaran pinjaman sebanyak Rp 100.000,- akan dikembalikan selama 50 kali (50 minggu), dengan angsuran sebesar Rp 2.500,- (-angsuran pokok sebesar Rp 2000,- dan angsuran bunga/biaya administrasi sebesar Rp 500,-
- Untuk pinjaman di atas Rp 100.000,- pola pengembalian pinjamannya seperti model peminjaman sebesar Rp 100.000,-
- Selain mengembalikan pinjaman, para anggota *Grameen Bank* diminta untuk menabung secara sukarela, yang didokumentasikan dalam Buku Tabungan Anggota.
- Setelah 5 (lima) kali melakukan peminjaman, anggota dianggap sudah mampu untuk mandiri dan kemudian sudah tidak melakukan pinjaman kembali).

c. Kegiatan Penunjang selain Kegiatan Utama

Beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh *Grameen Bank* di Kecamatan Pabelan di bawah naungan PT Bangun Karya Central Java Cabang Salatiga, antara lain adalah: (i) Pinjaman Biaya Sekolah; (ii) Pinjaman Perbaikan/Pendirian Rumah; (iii) Pinjaman Darurat/Mendadak;

(iv) Pinjaman Gaduhan Rajakaya; (v) Perpustakaan Sekolah; dan (vi) Pemberian Makanan Bergizi.

1) Pinjaman Biaya Sekolah

Salah satu 'Ikrar Anggota' yang dimuat dalam 'Pass Book' *Grameen Bank* adalah mendorong anak-anak untuk terus bersekolah. Sebagai konsekuensinya, ketika ada tunggakan biaya sekolah dari para murid (kebanyakan SLTP dan SLTA), *Grameen Bank* juga menyediakan bentuk pinjaman untuk mengatasi hal tersebut. Bedanya, kalau pinjaman jenis ini, pola pengembaliannya tanpa bunga dan waktunya tergantung kesepakatan dari para anggota di bawah kendali dalam 1 (satu) kelompok.

2) Pinjaman Perbaikan / Pendirian Rumah

Sama seperti pinjaman pembiayaan sekolah, jenis pinjaman ini juga tanpa bunga dan tergantung pada kesepakatan di antara para anggota dalam 1 kelompok.

3) Pinjaman Darurat / Mendadak

Pinjaman darurat / mendadak yang biasanya dilakukan adalah pinjaman untuk membiayai anggota keluarga peserta program *Grameen Bank* yang sedang sakit atau keperluan lain yang sifatnya mendesak.

4) Program Gaduhan Rajakaya

Program gaduhan rajakaya berwujud ternak sapi atau kambing yang akan dipelihara oleh anggota/peserta program *Grameen Bank*. Harga beli diinformasikan kepada calon pemelihara, kemudian ketika kemudian hari dijual, hasilnya akan dibagi dua setelah dikurangi harga pokok pembelian.

5) Program Perpustakaan Anak Sekolah Dasar

Perpustakaan sekolah yang dijalankan oleh *Grameen Bank* dibuka sejak Juli 2001. Tujuan utamanya untuk menumbuhkembangkan minat baca anak sekolah, dari SD hingga SLTA. Lokasi perpustakaan sementara ini berada di Rumah *Branch Manager* dengan alamat: Jln. Sutomo No.1 Susukan, Sukoharjo, Pabelan, Kab. Semarang (50771). Koleksi buku yang ada berupa Majalah Anak, Majalah Komputer, Majalah Motor dan Otomotif, Buku Pengetahuan Umum, Buku Ceritera Anak, Buku-Buku Ilmiah, dan sebagainya. Peminjaman tidak dipungut biaya, maksimum pinjaman selama 7 hari dengan maksimal pinjaman sebanyak 3 buku. Pada periode Januari – Mei 2008, tercatat ada 115 pengunjung.

6) Pemberian Makanan Bergizi dan Pemeriksaan Gratis

Program pemberian makanan bergizi diwujudkan dengan membagikan Kacang Hijau sebanyak 0,25 kg/anggota/bulan bagi ibu-ibu anggota *Grameen Bank* yang mempunyai anak BALITA (Bawah Lima Tahun). Sementara untuk program pemeriksaan gratis diberikan secara insidental (berkala).

d. Program *Grameen Bank* dan Pengurangan Kemiskinan

Program *Grameen Bank* secara tidak langsung dapat mengurangi kemiskinan, paling tidak melalui 2 (dua) sarana yaitu pemberian modal melalui pinjaman/kredit dan menjaga kelangsungan usaha.

1) Pemberian Pinjaman / Modal

Dari hasil pengolahan data pinjaman pada periode Januari – April 2008, dari sejumlah 149 peminjam, rata-rata peminjam per bulannya

mencapai di atas angka 30 orang, dengan rincian Januari ada 40 peminjam; Februari ada 43 peminjam; Maret 30 peminjam; dan April sebanyak 36 peminjam. Besaran pinjaman bergerak dari Rp 300.000,- hingga Rp 1.600.000,- (Maksimal pinjaman seharusnya Rp 1.500.000,-). Sebagian besar peminjam, meminjam untuk kegiatan usahanya pada besaran Rp 1.000.000,- yaitu sebanyak 51 orang atau 34,23%; kemudian pada besaran Rp 1.200.000,- sebanyak 28 orang atau 18,79%; pada besaran Rp 800.000,- sebanyak 23 orang atau 15,44%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

2) Kelangsungan dan Keberlanjutan Usaha

Kelangsungan dan keberlanjutan usaha, ditunjukkan dengan memanfaatkan pinjaman untuk membiayai usahanya. Sebagian besar penggunaan pinjaman untuk kegiatan usaha berdagang, yaitu sebanyak 70 orang atau sebesar 46,98%. Mata pencaharian pedagang ini, variasianya antara lain pedagang pakaian, pedagang topi, hasil ternak (ayam, lele, susu sapi), hasil pertanian (beras, ketela pohon, singkong, jagung, sayuran), kerajinan bambu (besek untuk kenduri, besek tembakau, besek ikan bandeng/tongkol, keranjang rumput, tusuk sate), pedagang bakso, pedagang mie ayam. Sedang peringkat kedua dari para peminjam dari *Grameen Bank* yaitu untuk kegiatan kerajinan / wirausaha, yang mencapai 56 orang atau sebesar 37,58%. Mata pencaharian sebagai pengrajin ini antara berupa anyaman bambu (keranjang rumput, besek ukuran kecil untuk ikan bandeng/tongkol, besek ukuran besar untuk kenduri dan tempat tembakau, tusuk sate), mebel/kayu; sedang untuk wiraswasta antara lain penjahit dan hiasan kristik. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Dari perpaduan pengkajian pada BAB II, BAB III dan juga BAB IV, beberapa kesimpulan yang sekaligus untuk menjawab tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Penanganannya cenderung berubah-ubah dan setiap dinas merencanakan program dan proyek terpisah dari program dan proyek dinas yang lain. Setiap kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan dilihat sebagai kegiatan jangka pendek (proyek) yang tidak saling berkaitan. Selama pemerintahan Orde Baru (ORBA) telah ada beberapa program yang dicanangkan untuk menanggulangi kemiskinan, yang antara lain dalam bentuk: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (TAKESRA) dan juga Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (KUKESRA). IDT memiliki sasaran penduduk miskin yang ada di desa-desa tertinggal, sedang TAKESRA dan KUKESRA memiliki sasaran penduduk miskin yang berada di luar lokasi desa-desa tertinggal. Sasarannya dibatasi pada keluarga yang masuk dalam kategori Keluarga Prasejahtera (KP) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I), hasil survei yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKB). Program lain yang pernah dilakukan, antara lain P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi

Dampak Krisis Eko-nomi), PARUL (*Poverty Alleviation through Rural-Urban Linkages* [Program Pengembangan Kawasan Desa-Kota Terpa-du]), dan juga program PSEM (Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat).

- b. Program-program pengurangan kemiskinan telah banyak dilakukan, namun angka kemiskinan juga masih tinggi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang pada tahun 1970 adalah 70 juta jiwa (60%), terus mengalami penurunan pada tahun 1996 menjadi 22,50 juta jiwa (11,30%) [-dengan pendekatan lama-] atau sebesar 34,01 juta jiwa (17,47%) [-dengan pendekatan baru-]. Sejak krisis ekonomi terjadi angka kemiskinan mengalami peningkatan kembali, yaitu menjadi 49,50 juta jiwa (24,23%) tahun 1998. Pada juni 2007, angka kemiskinan di Indonesia juga masih besar, yaitu sebesar 37,13 juta jiwa (17,75%).
- c. Kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Hal-hal yang tidak dimiliki oleh Penduduk Miskin, adalah: (i) Mutu tenaga kerja yang tinggi; (ii) Jumlah modal yang memadai; (iii) Luas tanah dan sumber alam yang cukup; (iv) Ketrampilan dan keahlian yang cukup tinggi; (v) Kondisi fisik jasmaniah dan rohaniah yang cukup baik; serta (vi) Lingkungan hidup yang memungkinkan perubahan dan kemajuan.
- d. Dalam upaya mengurangi kemiskinan, kata pemberdayaan sering digunakan sebagai alat/instrumen untuk mengatasinya. Strategi

pemberdayaan bertujuan mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya terlibat dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini, masyarakat miskin bukanlah obyek dari suatu program/kegiatan tetapi sebagai subjek/pelaku dalam program/kegiatan tersebut. Keberdayaan penduduk miskin ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif, dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpanan/aset keluarga miskin. Keberdayaan juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri.

- e. Berbagai strategi, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan sudah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh berbagai organisasi non-pemerintah, namun jika dilihat dari realisasinya, belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Data HDI (*Human Development Index*), GDI (*Genderrelated Development Index*) dan GEM (*Gender Empowerment Measurement*), masih menunjukkan adanya kesenjangan yang tinggi. Berdasarkan data dari *Indonesia Human Development Report 2004* (data tahun 2002), angka/indeks HDI sebesar 65,8; angka/indeks GDI sebesar 59,2; serta angka/indeks GEM sebesar 54,6. Selisih yang semakin besar antara HDI dan GDI menandakan semakin besarnya kesenjangan gender, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan dalam pembangunan gender atau masih terdapat

kesenjangan gender. Sementara indeks GEM yang semakin tinggi menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan semakin besar/ tinggi.

- f. Tujuan didirikannya *Grameen Bank* adalah untuk pemberdayaan perempuan agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan di negara asal *Grameen Bank* (Bangladesh), program pembangunan berkeadilan melalui *Grameen Bank* diupayakan bukan bersifat sebagai hadiah untuk kemiskinan, tetapi untuk menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Upaya pengembangan kapasitas masyarakat ini, dilakukan oleh masyarakat sendiri tetapi melalui mekanisme kelompok. Pembentukan kelompok merupakan langkah awal yang paling strategis, dan akan menentukan keberhasilan program tersebut untuk selanjutnya. Dalam kelompok, para anggota secara bersama akan menentukan besarnya pinjaman, penggunaan pinjaman, dan juga pengawasan di dalam pengembalian angsurannya. Dengan demikian, selain menumbuhkan sifat gotong-royong juga membangun kemandirian, disiplin dan juga kejujuran dari para anggotanya.
- g. Program *Grameen Bank* secara tidak langsung dapat mengurangi kemiskinan, paling tidak melalui 2 (dua) sarana yaitu pemberian modal melalui pinjaman/kredit dan menjaga kelangsungan usaha. Dari hasil pengolahan data pinjaman pada periode Januari – April 2008, dari sejumlah 149 peminjam, rata-rata peminjam per bulannya mencapai di atas angka 30 orang, dengan rincian Januari ada 40 peminjam; Februari ada 43 peminjam; Maret 30 peminjam; dan April sebanyak 36 peminjam. Besaran pinjaman bergerak dari Rp 300.000,- hingga

Rp 1.600.000,- (Maksimal pinjaman seharusnya Rp 1.500.000,-). Sebagian besar peminjam, meminjam untuk kegiatan usahanya pada besaran Rp 1.000.000,- yaitu sebanyak 51 orang atau 34,23%; kemudian pada besaran Rp 1.200.00,- sebanyak 28 orang atau 18,79%; pada besaran Rp 800.000,- sebanyak 23 orang atau 15,44%. Sementara, Kelang-sungan dan keberlanjutan usaha, ditunjukkan dengan memanfaatkan pinjaman untuk membiayai usahanya. Sebagian besar penggunaan pinjaman untuk kegiatan usaha berdagang, yaitu sebanyak 70 orang atau sebesar 46,98%. Mata pencaharian pedagang ini, variasianya anatar lain pedagang pakaian, pedagang topi, hasil ternak (ayam, lele, susu sapi), hasil pertanian (beras, ketela pohon, singkong, jagung, sayuran), kerajinan bambu (besek untuk kenduri, besek tembakau, besek ikan bandeng/ tongkol, keranjang rumput, tusuk sate), pedagang bakso, pedagang mie ayam. Sedang peringkat kedua dari para peminjam dari *Grameen Bank* yaitu untuk kegiatan kerajinan / wirausaha, yang mencapai 56 orang atau sebesar 37,58%. Mata pencaharian sebagai pengrajin ini antara berupa anyaman bambu (keranjang rumput, besek ukuran kecil untuk ikan bandeng/tongkol, besek ukuran besar untuk kenduri dan tempat tembakau, tusuk sate), mebel/kayu; sedang untuk wiraswasta antara lain penjahit dan hiasan kristik.

5.2. Saran dan Implementasi Kebijakan

Saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan, berdasar pada hasil pengkajian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasar konsep dan dimensi kemiskinan yang sangat luas, maka upaya untuk memecahkan dan juga mengurangi tingkat kemiskinan

- diperlukan langkah yang terpadu, multidisiplin dan juga upaya saling bantu-membantu dari semua pihak. Upaya pengurangan kemiskinan harus menjadi tanggung jawab semua pihak, dengan tanpa kecuali.
- b. Pemberdayaan pada dasarnya adalah sebuah proses yang alamiah, yaitu proses yang sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dimana setiap tahapan usia akan berhadapan dengan permasalahan yang berbeda dengan cara penyelesaian yang tidak sama. Oleh karenanya, adanya keberdayaan dari penduduk miskin harus ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja diciptakan sendiri oleh penduduk miskin secara kolektif, yang pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi, serta meningkatkan nilai simpan-an/aset keluarga miskin. Keberdayaan juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk miskin secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri.
- c. Upaya pengurangan kemiskinan akan efektif, jika: (i) ada keinginan politik dari semua pihak untuk mewujudkannya; (ii) seluruh sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemerintah (-baik pusat maupun daerah-) terintegrasi dengan baik; (iii) adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); (iv) adanya pembagian peran yang jelas dan adil antar pelaku dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat; dan sebagainya.
- d. Pendapat Koentjaraningrat (2004) dalam bukunya mengenai Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, perlu direnungkan semua pihak. Lebih lanjut dikatakan bahwa secara umum Mentalitas Manusia

Indonesia adalah: (i) Meremehkan mutu; (ii) Suka menerobos; (iii) Kurang percaya pada kemampuan sendiri; (iv) Kurang disiplin; dan (v) Suka mengabaikan tanggung-jawabnya. Keberhasilan dalam upaya mengurangi kemiskinan, sebaiknya dimulai dengan mencoba mengubah paradigma seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat tersebut, dengan cara untuk terus mencari alternatifnya pemecahannya.

Catatan Akhir

1) Sejak tahun 1994, BKKBN mengembangkan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dengan menggunakan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator gizi, dan indikator sosial. Hasil dari penelitian tersebut dapat memetakan kesejahteraan dalam tingkatan dan kategori: (i) Keluarga Prasejahtera (KP), (ii) Keluarga Sejahtera I (KS-I), (iii) Keluarga Sejahtera II (KS-II), dan (iv) Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus). Keluarga yang masuk kategori miskin adalah KP dan KS-I. Gambaran selengkapnya, antara lain dapat dilihat pada Ambar Teguh Sulistiani (2004: 35) dan juga Tim Crescent (2003: 5-6). Sementara, terkait dengan perbedaan kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan (IDT, P3DT, PPK, P2KP, PDMDKE, PARUL dan PSEM), dapat dilihat pada Gunawan Sumodiningrat (2007: 72-6 [Tabel 4]).

2) Beberapa konsep yang terkait dengan gender, dapat dijelaskan sebagai berikut: (i) SEKS, yaitu perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan baik terkait dengan ciri fisik primer maupun ciri fisik sekunder; (ii) GENDER, yaitu perbedaan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan dan masyarakat sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perubahan jaman; (iii) BIAS GENDER, yaitu kesenjangan (*gap*) peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; (iv) PENGARUSUTAMAAN GENDER, yaitu strategi pengintegrasian kesetaraan dan keadilan gender ke dalam pembangunan mulai dari tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi dan monitoring; serta (v) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, yaitu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Kantor Meneg PP, 2001: 85).

3) Ke-12 Centre dimaksud, yaitu: (1) Padaan (Desa Padaan); (2) Susukan (Desa Sukoharjo); (3) Setro (Desa Sukoharjo); (4) Gentan (Desa Tukang); (5) Karang (Desa Tukang); (6) Tegalsari (Desa Jembrak); (7) Bungas (Desa Kadirejo); (8) Catalan (Desa Kadirejo); (9) Glawan (Desa Glawan); (10) Tegalsale (Desa Jembrak); (11) Kodran (Desa Terban); dan (12) Pete (Sukoharjo).

4) Dalam praktek (-seperti yang ada di lampiran-), dari hasil pengolahan data pinjaman selama periode Januari - April 2008, dari total peminjam *Grameen Bank* sebanyak 149 orang, yang melakukan peminjaman hingga periode ke-6 ada 15 orang (10,07%), periode ke-7 ada 7 orang (4,70%), dan periode ke-8 ada 4 orang (2,68%). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Cahyat dan Moira Moeliono. (2005). Pengarusutamana Kemiskinan: Apa Mengapa dan Bagaimana? *Governance Brief CIFOR (Center for International Forestry Research)*, Desember, Nomor 25, hal.1-5.
- Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdaya-an*, Edisi Pertama, Cetakan. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Alfian, Mely G.Tan dan Selo Sumarjan [Penyunting].(1980). *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Ari Pradhanawati. (2008). "Teori Kemiskinan", *Supplement* Mata Kuliah Sosiologi Pembangunan Program Doktor Ilmu Ekonomi UNDIP Semarang.
- Bambang Sarosa. (2008). "Quo Vadis *Grameen Bank*", *Makalah* disampaikan dalam Diskusi Bulanan POKDIS (Kelompok Diskusi) Ekonomi Kerakyatan di Fakultas Ekonomi UNS, 22 Mei.
- Chriswadani Suryawati (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensio-nal. *JMPK*, September, Vol.08, No.03, hal. 121-129.
- Emil Salim. (1976a). *Perencanaan Pembangunan dan Perataan Pembangunan-an* [Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ekonomi Perencanaan FE-UI, 14 Februari]. Jakarta: Lembaga Penerbut FE-UI.
- _____. (1976b). *Masalah Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Ketiga.

- Gunawan Sumodiningrat. (2007). *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. (2001). *Buku Saku Informasi Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi.
- Kecamatan Pabelan. (2006). Data Monografi Kecamatan Pabelan Tahun 2005.
- Lukman Hakim (2007). "Model Pengembangan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Menurut Pandangan Pemangku Kepentingan". *Usul Penelitian Hibah Bersaing, PIPW-LPPM UNS Surakarta*.
- Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tim Crescent. (2003). *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI

Pembangunan menghasilkan ide kemajuan, berkonotasi ke depan atau ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Pembangunan juga didefinisikan sebagai pertumbuhan plus perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ada pula yang menafsirkan sebagai kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia.

Pada hakekatnya ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Integrasi antara ketiga himpunan bagian disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Buku yang sedang dinikmati pembaca ini adalah mengulas pernah-bernik pembangunan dari perspektif sosiologis, yang lebih mengambil domain sosial.

Pembangunan haruslah menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Proses pembangunan harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan dan meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama karena bisa menjadi penyebab instabilitas yang akan membawa pengaruh negatif, seperti longgarnya ikatan-ikatan sosial dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia. Karena itu, komitmen dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil dan tanpa mengecualikan rakyat miskin, meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari hak azasi, nondiskriminasi dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung; merupakan hakekat dari paradigma pembangunan berpusatkan pada kemanusiaan manusia.

Buku ini merupakan hasil karya 7 (tujuh) penulis yang kebetulan tengah menempuh studi S-3 Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang . Tulisan-tulisan ini sudah melewati berbagai diskusi panjang. Masing-masing telah mengambil tema dan pendekatan yang hampir semuanya menggunakan perspektif sosiologi sebagai landasan analisis kajian.

ISBN : 978 - 602 - 8271 - 00 - 4